



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LANGSA TAHUN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (PAPBK), perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2018 guna disesuaikan dengan perkembangan asumsi yang berkenaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 121);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
16. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 719);

17. Peraturan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Langsa untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2018.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) setelah disepakati dengan DPRK.

BAB II  
TUJUAN, FUNGSI DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN  
PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD bertujuan untuk terciptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa Tahun 2017-2022 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2018.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2018;
  - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan KUA Tahun 2018 dan rancangan PPAS Tahun 2018; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan PAPBK Langsa Tahun 2018.
- (4) Perubahan RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD KOTA LANGSA TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA  
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RPKD TAHUN 2018  
BAB IV : PENUTUP
- (5) Perincian Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam hal Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berbeda dengan KUPA Tahun 2018 dan PPAS Perubahan Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRK, maka KUPA Tahun 2018 dan PPAS Perubahan Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRK menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun Rancangan PAPBK Langsa Tahun 2018.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 16 Juli 2018 M  
3 Dzulqaidah 1439 H

 WALIKOTA LANGSA, 

  
 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 16 Juli 2018 M  
3 Dzulqaidah 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 732

LAMPIRAN :  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PEMBANGUNAN KOTA  
LANGSA TAHUN 2018

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LANGSA TAHUN 2018**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Perubahan (RAPBK-P) untuk Tahun Anggaran 2018. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dokumen tersebut terlebih dahulu didahului oleh penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2018.

Perubahan RKPD Kota Langsa Tahun 2018 ini merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat. Perubahan RKPD Kota Langsa Tahun 2018 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi perangkat daerah yang dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2018, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi seluruh *stakeholder* serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi *stakeholder* pada tahun pelaksanaan.

 - WALIKOTA LANGSA 

  
MUSMAN ABDULLAH